

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KAWASAN NUSA PENIDA DI KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI

Ida Ayu Diah Laksmi Gayatri
NPP. 29.1224
Asdaf Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali
Program Studi Kebijakan Publik

Email : ddayu18@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research is motivated by an archipelagic area, namely the Nusa Penida Islands which is rich in natural potential, but many are abandoned by the original community because it is difficult to access various things such as inadequate facilities and infrastructure, difficult access to clean water, there are still blank spots and transportation facilities. still minimal. Through the wealth of natural potential it has, the Klungkung Regency Government has started to develop, develop, and market tourism since 2013. However, there are still obstacles such as the lack of budget, lack of support from the private sector, and problems with land that is still owned by individuals.

Purpose: The purpose of this study is to describe the implementation of tourism development policies in the Nusa Penida area. **Method:** This study uses a qualitative descriptive research method. Data collection techniques used interview, observation, and document techniques.

Result: The findings obtained from this study are that the implementation has been carried out well although there are still obstacles, there are supporting factors and inhibiting factors in the implementation of tourism development in the Nusa Penida area. In addition, there are efforts made by the Klungkung Regency Tourism Office in the development of tourism in the Nusa Penida area. **Conclusion:** It can be concluded that the implementation of tourism development policies in the Nusa Penida area has been going well, but there are still many obstacles to its implementation. To overcome these obstacles, it is recommended to improve supporting facilities and infrastructure, improve the quality of human resources, and dig deeper into the natural potential that has not been exposed.

Keywords: Implementation, Tourism Development, Tourism Office

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi dengan sebuah kawasan kepulauan yakni Kepulauan Nusa Penida yang kaya akan potensi alam, namun banyak ditinggalkan oleh masyarakat aslinya karena sulitnya untuk mengakses berbagai hal seperti sarana dan prasarana kurang memadai, sulit mengakses air bersih, masih terdapat daerah *blank spot*, dan sarana transportasi masih minim. Melalui kekayaan potensi alam yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Klungkung mulai melakukan pembangunan, pengembangan, dan pemasaran pariwisata sejak tahun 2013. Namun, masih terjadi kendala seperti minimnya anggaran, kurangnya dukungan dari sektor swasta, dan permasalahan pada lahan yang masih milik perorangan. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumen. **Hasil/Temuan:** Temuan yang

diperoleh dari penelitian ini yakni implementasi telah dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada kendala, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida. Selain itu juga, terdapat upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung dalam pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida. **Kesimpulan:** Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida telah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya. Guna mengatasi kendala tersebut, maka disarankan untuk meningkatkan sarana dan prasana pendukung, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menggali lebih dalam mengenai potensi alam yang belum terekspos.

Kata Kunci : Implementasi, Pengembangan Pariwisata, Dinas Pariwisata

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan Indonesia karena memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan yang didukung dengan kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Pariwisata memiliki kontribusi yang besar sehingga dapat dikatakan sebagai penyokong terbesar dalam sumber pendapatan negara. Provinsi Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sudah sangat terkenal akan keindahan alamnya hingga ke mancanegara. Melalui keindahan dan kekayaan alam yang dimilikinya, menjadikan Bali semakin populer dan mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Hal ini dibuktikan dengan data milik Badan Pusat Statistik mengenai jumlah kunjungan wisatawan ke Bali pada tahun 2017 sebanyak 5.697.739 orang. Kemudian, mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 6.070.473 orang. Dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2019 sebanyak 6.275.210 orang. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang sangat dahsyat yakni sebanyak 1.069.473 orang.

Pemerintah Provinsi Bali sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang berdasarkan atas asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pariwisata merupakan salah satu unsur dari urusan pilihan yang masuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren. Berdasarkan pada pernyataan tersebut, maka seluruh kepala daerah di Provinsi Bali semakin bersemangat dalam meningkatkan pengembangan sektor pariwisatanya dan berimbas pada kemampuan Provinsi Bali sebagai penyumbang devisa negara setiap tahunnya yang mencapai sekitar Rp 100 triliun.

Kabupaten Klungkung merupakan salah satu daerah di Provinsi Bali yang juga bersemangat dalam upaya mengembangkan pariwisata melalui penerapan kebijakan pengembangan pariwisata yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033. Sektor pariwisata mampu berkontribusi terhadap pendapatan produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Klungkung sekitar 10,33 persen pada tahun 2020 dan merupakan jumlah terbesar kedua setelah pertanian. Sehingga, melalui hal tersebut dapat dinyatakan bahwa sektor pariwisata merupakan tulang punggung penggerak perekonomian di Kabupaten Klungkung.

Kabupaten Klungkung memiliki banyak kawasan pariwisata, salah satunya kawasan pariwisata Nusa Penida yang masuk dalam sebelas kawasan strategis pariwisata di Bali dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Kawasan pariwisata Nusa Penida merupakan suatu kawasan yang terdiri atas tiga pulau dengan

kekayaan dan keindahan alam melimpah serta potensi wisata yang beragam yakni Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, dan Pulau Nusa Ceningan. Namun nyatanya, kesiapan sumber daya serta infrastruktur menjadikan potensi wisata di kawasan Nusa Penida belum dapat berkembang dengan optimal untuk mengemas daya tarik wisatanya maupun penyediaan fasilitas kepariwisataan.

Melihat potensi wisata yang cukup besar di kawasan Nusa Penida, Pemerintah Kabupaten Klungkung mencanangkan untuk melakukan pengembangan pariwisata pada tahun 2013. Namun, masih banyak kendala yang terjadi dalam proses kebijakan pengembangan pariwisata. Kendala tersebut yakni masih kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung dan penunjang pariwisata, masih terdapat daerah di kawasan Nusa Penida yang tidak terjangkau oleh sinyal, kurang layaknya pelabuhan di Nusa Penida, kurangnya transportasi dari Pulau Bali menuju kawasan Nusa Penida, terbatasnya anggaran untuk pengembangan pariwisata, lahan di Nusa Penida sebagian besar milik perseorangan, dan kurangnya dukungan sektor swasta yang diakibatkan oleh anggapan sektor swasta bahwa kawasan Nusa Penida belum menguntungkan.

Sejak tahun 2017 mulai dilakukan pembangunan, pengembangan, dan promosi pariwisata melalui penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033. Diharapkan melalui penerapan kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida akan mampu merubah kondisi kawasan Nusa Penida untuk lebih baik guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Tentunya dampak dari penerapan kebijakan tersebut akan dirasakan langsung oleh masyarakat di kawasan Nusa Penida.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida yakni sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sebagai wilayah kepulauan yang terpisah dari daratan Pulau Bali, menjadikan Kepulauan Nusa Penida kurang diperhatikan dan lebih banyak ditinggalkan oleh masyarakat aslinya untuk pergi merantau ke daratan Pulau Bali. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang belum mendukung dan menunjang untuk kehidupan masyarakatnya dan pengembangan pariwisata. Seperti masih kurangnya transportasi untuk pergi ke daratan Pulau Bali dan sebaliknya, sehingga untuk keadaan yang darurat belum bisa tertangani dengan baik. Selain itu, kurangnya toko obat-obatan dan pelayanan kesehatan yang tentu saja membuat kewalahan untuk orang yang sedang membutuhkan penanganan medis dengan cepat.

Permasalahan lainnya yang berkaitan yakni lahan di Nusa Penida masih milik perseorangan, sehingga mempersulit dalam proses pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata. Akibat dari sarana dan prasarana yang kurang memadai, daerah yang cukup gersang dan panas, daerah yang belum semuanya dapat mengakses sinyal, dan sanitasi yang kurang menjadikan pihak sektor swasta beranggapan bahwa Kepulauan Nusa Penida belum dapat memberikan jaminan untuk suatu hal yang menguntungkan. Anggapan dari sektor swasta juga menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida karena kurangnya dukungan serta terkendala dalam anggaran yang terbatas.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks pengembangan pariwisata. Penelitian Agustina Pallewa berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara” menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Toraja Utara terindikasi kurang optimal dalam mengimplementasikan kebijakan yang mengakibatkan kurangnya tingkat ketentraman

masyarakat. Sehingga dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan optimal. Penelitian Novi Yudianti berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban” menemukan bahwa kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu belum bisa menarik wisatawan untuk berkunjung dan belum menjadi destinasi wisata yang maksimal. Sehingga didapatkan bahwa implementasi kebijakan sudah dilaksanakan namun belum optimal. Penelitian Mex Iver Mapahena, dkk berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Selat Lembeh Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung” menemukan bahwa pada pengembangan objek wisata Selat Lembeh hanya berfokus pada sumber daya alamnya dan mengesampingkan ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, keamanan, dan sikap masyarakat sekitar. Dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan tidak terlaksana dengan baik. Penelitian Berry Syahmeiza, dkk berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan” menemukan bahwa pelaksanaan Renstra tidak berjalan dengan baik dan masih terdapat masalah pada pengembangan pariwisata yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Empat Lawang hanya memfokuskan kepada kegiatan kesenian dan kebudayaan yang mengakibatkan keterlambatan dalam mengidentifikasi potensi pariwisata serta terkendala dalam penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata. Sehingga dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan efektif apabila dilihat dari aspek ketaatan dengan tingkat yang masih rendah dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Empat Lawang masih kurang lancar. Hal ini menyebabkan kinerja kebijakan belum sesuai dengan yang diinginkan dan dampaknya belum tercapai. Penelitian Delly, dkk berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu” menemukan bahwa kurangnya kebersihan dan fasilitas yang kurang. Sehingga dapat dinyatakan bahwa masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk menjaga kawasan pariwisata Pantai Panjang. Penelitian Medlin Anggreyni Hura berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Kawasan Soziona Kabupaten Nias” menemukan bahwa pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kawasan Soziona belum maksimal, sarana dan prasana yang tidak memadai, terbatas, dan minimnya akses menuju objek wisata. Sehingga, pencapaian tujuan yang telah direncanakan belum maksimal. Penelitian Yophi Salrahmanda berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Sejarah Oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak Tahun 2012-2014” menemukan bahwa belum terbenahi permasalahan dan tertatanya sarana dan prasarana objek wisata, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam bidang pariwisata yang mengakibatkan daya saing pariwisata masih rendah, pemasaran pariwisata belum tepat sasaran terhadap peningkatan kunjungan, dan fasilitas penunjang kepariwisataan belum memadai. Dampak dari pengembangan pariwisata yang masih memadukan dengan kegiatan olahraga adalah objek wisata belum menjadi andalan dan tidak berkembang. Penelitian Soleman Yelo Bora “Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Bunga Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” menemukan bahwa kurang maksimal dalam pendampingan pihak pemerintah dan lokasi pembibitan wisata bunga belum memenuhi standar. Dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik melalui transparansi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, terpenuhinya jumlah tenaga kerja usia produktif, dan struktur birokrasi berjalan cukup baik.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Nusa Penida melalui penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033.

Dalam penelitian ini permasalahan dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III yang mempunyai empat dimensi yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, yang sangat membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada penggunaan teori pengembangan pariwisata menurut Robert Christie Mill yang terdiri atas empat analisa yakni analisa pasar, analisa teknik dan perencanaan, analisa sosio-ekonomi, dan analisa bisnis dan hukum. Teori pengembangan pariwisata menurut Robert Christie Mill digunakan untuk mendukung dan memperkuat permasalahan yang dianalisis dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida, untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida serta upaya yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan berpikir deduktif. Penulis menggunakan data primer dan data sekunder, dalam mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan informan. Untuk menentukan informan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, penulis menerapkan teknik sampling. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah teknik *purposive sampling* dan teknik *incidental sampling*. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui tiga cara yakni wawancara terstruktur, observasi terang-terangan, dan dokumen. Dalam menganalisis data yang telah didapatkan, penulis menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Analisis teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III dengan empat dimensi, terdiri atas pertama, komunikasi yang memiliki tiga indikator yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi; kedua, sumber daya dengan empat indikator yaitu staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas; ketiga, disposisi dengan dua dimensi yang terdiri dari kognisi serta arahan dan tanggapan pelaksanaan; dan keempat, struktur birokrasi yang terdiri atas indikator standar operasional prosedur dan tanggungjawab. Selain itu, teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III juga didukung oleh teori pengembangan pariwisata menurut Robert Christie Mill dengan empat analisa yang terdiri dari pertama, analisa pasar dengan empat indikator yakni inventaris daya tarik wisatawan, inventaris fasilitas, modal transportasi, dan pasar; kedua, analisa teknik dan perencanaan dengan tiga indikator yakni komunikasi dan transportasi, ketersediaan lahan untuk pariwisata, dan aspek lingkungan dan ekologis; ketiga, analisa sosio-ekonomi dengan dua indikator yang terdiri dari masyarakat sekitar dan produk pelayanan pendukung; keempat, analisa bisnis dan hukum dengan dua indikator yang terdiri dari lingkungan bisnis dan ruang lingkup hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Analisis Menurut Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Pada penelitian ini, penulis menganalisis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan informasi yang terkait dengan permasalahan, disertai dengan penjelasan yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan dimensi menurut teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai berikut.

1. Komunikasi

Komunikasi mempunyai peran untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam komunikasi, terdapat tiga indikator yakni :

1) Transmisi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis analisis, dapat dinyatakan bahwa transmisi dalam kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida termasuk dalam kategori yang baik dan berjalan dengan lancar. Namun, tetap terdapat keterbatasan pada wilayah yang masih masuk dalam zona *blank spot* dan kurangnya komunikasi dengan pemilik lahan, desa adat, dan masyarakat setempat yang berada di lingkungan pengembangan pariwisata. Selain itu, karena masih suasana pandemi Covid-19 maka segala jenis komunikasi dilakukan melalui online.

2) Kejelasan

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang penulis lakukan, dapat dinyatakan bahwa kejelasan tujuan dan cara implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida sudah baik dan bagus yang dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Kemudian, ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025. Dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033.

Apabila dianalisis dengan teori tujuan kebijakan, maka tujuan kebijakan pengembangan pariwisata sudah sesuai dilihat dengan jelasnya tujuan dari implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida yakni untuk meningkatkan PAD, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan kunjungan wisatawan ke Nusa Penida, meningkatkan retribusi dan pajak, serta memotivasi pelaku wisata agar bisa berkembang dan berinovasi.

3) Konsistensi

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, dapat dinyatakan bahwa ketetapan dan kejelasan komunikasi terkait dengan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida masih kurang. Hal ini diakibatkan oleh masyarakat pemilik lahan yang belum bisa memahami dampak pengembangan pariwisata dan kurang mendukung kebijakan pengembangan pariwisata. Sehingga pelaksanaan pengembangan pariwisata masih mengalami kesulitan di beberapa wilayah atau lahan masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki empat indikator yang diperlukan dalam implementasi terdiri dari :

1) Staf

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang dilakukan oleh penulis, dapat dinyatakan bahwa staf atau sumber daya manusia pada implementasi kebijakan pengembangan pariwisata belum sesuai antara kemampuan dengan bagian pekerjaan. Perlu ditingkatkan terkait dengan kualitas dan kuantitas staf yang dapat diperoleh melalui sekolah pariwisata dan pelatihan-pelatihan kompetensi kepariwisataan. Agar nantinya staf atau sumber daya manusia tersebut dapat bersaing di dunia pariwisata.

2) Informasi

Informasi mengenai pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan, dapat dinyatakan bahwa informasi

mengenai pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida juga dapat diakses pada website dan mendatangi langsung Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung.

3) Kewenangan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat dinyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung masih dan akan bergantung pada implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida yang didalamnya berisi visi misi Bupati Klungkung. Hal ini juga berlaku bagi Camat Nusa Penida yang kewenangannya bergantung pada implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida dan kewenangan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung. Sehingga tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida.

4) Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, dapat dinyatakan bahwa fasilitas dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida sangat terbatas dan minim. Hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran yang tersedia, sehingga banyak fasilitas yang belum terpenuhi dan tidak memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Selain itu, dapat menimbulkan ketidakefektifan dalam segala penanganan, baik penanganan kesehatan, sanitasi dan kebersihan, listrik, keuangan dan perbankan, keamanan, penyandang cacat, dan pelabuhan.

3. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana kebijakan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan maka terdapat dua indikator dalam disposisi yakni :

1) Kognisi

Kognisi berkaitan dengan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pemahaman mengenai implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida sudah tertuang dalam naskah akademik Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan penulis, dapat dinyatakan bahwa Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung sudah memiliki pemahaman terkait dengan kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida serta memahami konsep pelaksanaan pengembangan pariwisata yang akan diimplementasikan. Sebagai pelaksana juga harus memiliki sikap yang akuntabilitas dan integritas. Karena pelaksana kebijaka tentunya harus bertanggungjawab pada pelaksanaan pengembangan pariwisata. Selain itu juga, harus berintegritas untuk mampu membuktikan bahwa pelaksana kebijakan tersebut mampu mencapai apa yang telah direncanakan dalam kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida.

2) Arahan dan Tanggapan Pelaksana

Arahan dan tanggapan pelaksana berhubungan dengan penerimaan dan penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan, dapat dinyatakan bahwa sebagai Kepala Dinas Pariwisata yang notabeneanya bawahan Bupati tentu harus selalu menerima dan mendukung segala kebijakan yang diinginkan oleh Bupati untuk diterapkan. Dan isi dari kebijakan itu adalah visi dan misi Bupati, maka harus didukung dengan maksimal. Namun, tetap menolak dengan halus dan bijaksana apabila didapatkan suatu hal yang mengganjal maupun melenceng.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dapat mengatur aliran tata pekerjaan antara pelaksana yang melibatkan lebih dari satu institusi dan tanggungjawab pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dapat melahirkan SOP yang berisi aturan untuk melaksanakan implementasi kebijakan dengan melibatkan berbagai dinas terkait. Serta tanggungjawab yang dimiliki oleh Kepala Dinas merupakan suatu hal yang penting dan kewajiban yang harus diselesaikan apabila terjadi berbagai kejadian dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida. Pada struktur birokrasi juga berkaitan dengan target, yang mana sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan target merupakan suatu pencapaian yang telah direncanakan sejak adanya struktur birokrasi. Sehingga, tanpa adanya target maka struktur birokrasi tersebut tidak memiliki tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, adanya target sangat berpengaruh untuk membuat struktur birokrasi yang minim struktur namun kaya fungsi.

3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Nusa Penida

Faktor pendukung merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi suatu kebijakan karena melalui faktor pendukung akan memperlancar pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis didapatkan beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Nusa Penida yang terdiri atas sebagai berikut :

1. Adanya potensi alam yang sangat melimpah sehingga mampu mendukung dan memperlancar pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Nusa Penida agar tercapainya tujuan dari pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata.
2. Adanya dukungan pimpinan yang menjadi faktor utama dan pendukung dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida. Dalam hal ini yakni dukungan pimpinan berupa komitmen Bupati Kabupaten Klungkung yang sudah matang mengenai pengembangan pariwisata di kawasan Nusa Penida.
3. Adanya dasar hukum yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida.

Selain faktor pendukung, terdapat juga faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida yang terdiri atas :

1. Berada pada masa pandemi Covid-19 yang mampu menghambat pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata.
2. Kurangnya dukungan dari masyarakat asli Nusa Penida, utamanya masyarakat pemilik lahan.
3. Kondisi geografis Nusa Penida yang berbentuk kepulauan dan terpisahkan oleh lautan dengan daratan pulau Bali menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata. Seperti kondisi cuaca yang tidak menentu dan transportasi yang masih kurang.

3.3 Upaya yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan Nusa Penida

Untuk mengatasi hambatan yang ada, Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan beberapa upaya agar kebijakan pengembangan pariwisata dapat berjalan maksimal diantaranya :

1. Meningkatkan akomodasi agar tercapainya pengembangan pariwisata melalui menambah ragam jenis transportasi sehingga mampu mempermudah wisatawan datang ke Nusa Penida.
2. Melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait dengan pengembangan pariwisata, utamanya masyarakat pemilik lahan.
3. Pembuatan masterplan *One Gate One Destination* yang mencakup pengembangan objek pariwisata, sumber daya manusia, stakeholders, dan kerjasama dengan pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan lembaga. Diharapkan masterplan ini dapat membantu memperlancar pengembangan pariwisata di kawasan Nusa Penida.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Nusa Penida diharapkan cukup memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Namun, faktanya masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan menerima akan pelaksanaan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida. Dalam penelitian ini, penulis menemukan temuan utama yakni pembuatan masterplan *One Gate One Destination* yang secara khusus diterapkan di kawasan Nusa Penida. Hal ini disebabkan oleh pandangan Bupati Klungkung yang sangat menaruh harapan pada kawasan Nusa Penida agar mampu menarik perhatian wisatawan dan memperkenalkan kawasan Nusa Penida sebagai kawasan pariwisata yang baru, alami, dan layak untuk dikunjungi. Melalui masterplan *One Gate One Destination* diharapkan mampu memberikan kenyamanan kepada wisatawan dalam mengeksplor keindahan alam kawasan Nusa Penida. Selain itu, dari adanya masterplan tersebut mampu menata pariwisata kawasan Nusa Penida menjadi lebih baik lagi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penelitian yang telah penulis lakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida telah dilaksanakan, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil analisis dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III. Dengan menggunakan empat dimensi yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
2. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata. Faktor pendukung terdiri atas potensi alam, dukungan pimpinan, dan dasar hukum. Sedangkan faktor penghambat terdiri atas pandemi Covid-19, kurangnya dukungan masyarakat asli, dan kondisi geografis kawasan Nusa Penida.
3. Dalam mengatasi hambatan yang ada, maka Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya seperti meningkatkan akomodasi, melakukan pendekatan kepada masyarakat yang khususnya masyarakat asli dan pemilik lahan, serta pembuatan masterplan *One Gate One Destination* guna memperlancar pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam waktu dan penerapan Peraturan Daerah yang isinya mencakup seluruh kawasan pariwisata di Kabupaten Klungkung dan belum terlalu fokus terkait dengan kawasan Nusa Penida berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III.

Arah dan Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya penemuan penelitian. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk melakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama dan berkaitan dengan kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida untuk mendapatkan hasil yang lebih dalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada :

1. Bapak Dr. Hadi Prabowo, MM selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
2. Bapak Dr. Andi Pitono, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Politik Pemerintahan;
3. Bapak Anwar Rosshad, S.H., M.Si selaku Ketua Prodi Studi Kebijakan Publik;
4. Ibu Dr. Ani Martini, S.STP., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Averus, S.STP., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah menuntun, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi;
5. Seluruh Dosen Pengajar, Pelatih, dan Pengasuh, serta seluruh Civitas Akademika baik Kampus Jatinangor maupun Kampus Regional Sulawesi Selatan atas bimbingan dan ilmu yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di lembaga IPDN;
6. Seluruh ASN Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ayahanda Ir. Ida Bagus Ngurah Mantra dan Ibunda Ida Ayu Putu Wirati, SH yang telah membesarkan dan mendidik penulis serta senantiasa memberikan saran, masukan, serta doa demi kelancaran penulis dalam menuntaskan skripsi. Adikku tercinta Ida Bagus Bayu Krishnamurthi yang selalu memberikan dukungan dan doa;
8. Saudara sekontingen Bali XXIX yang selalu mendukung penulis, serta adik kontingen Bali XXX, XXXI, XXXII;
9. Seluruh rekan-rekan Wisma Nusantara 5 Bawah ex Regional Sulawesi Selatan yang selalu mendukung dan tidak lupa teman sekamar Bella Indri dan Florentia yang selalu memberikan semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis;
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sangat membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Kedua. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Bali, Badan Pusat Statistika Provinsi. *Provinsi Bali Dalam Angka 2021*. Edited by Badan Pusat Statistika Provinsi Bali. Provinsi Bali: Badan Pusat Statistika Provinsi Bali, 2019.
- Bali, Badan Statistika Provinsi. *Provinsi Bali Dalam Angka 2018*. Provinsi Bali: CV. Bhineka Karya, 2018.
- Bali, BPS Provinsi. "Provinsi Bali Dalam Angka 2020." edited by BPS Provinsi Bali, 522. Denpasar: BPS Provinsi Bali, 2020.
- . "Provinsi Bali Dalam Angka 2021." edited by BPS Provinsi Bali, 524. Denpasar: BPS Provinsi Bali, 2021.
- Batubara, Tigor. "Strategi Pengembangan Wisata Candi Padang Roco Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat" (n.d.).
- Bora, Soleman Yelo. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Bunga Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik* 7, no. 3 (2018): 8.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kedua. Jakarta: Kencana, 2017.
- Delly. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu." *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2019): 15.
- Djaenuri, Aries. "Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah." In *Sistem Pemerintahan Daerah*, 49. Pertama., n.d.
- Djazuli. "Pariwisata Berikan Kontribusi Pada Pendapatan Negara." *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, 2019.

- (DISBUDPAR) Kota Bukittinggi Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).” Universitas Andalas, 2015.
- Salrahmanda, Yophi. “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Sejarah Oleh Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Siak Tahun 2012-2014.” *Jom Fisip* 2, no. 2 (2015): 15.
- Sedarmayanti. *Pembangunan Dan Pengembangan Pariwisata*. Edited by Nurul Falah Atif. Kesatu. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Sitoresmi, Ayu Rifka. “Pengertian Informasi, Ciri-Ciri, Fungsi, Dan Jenis-Jenisnya Yang Perlu Diketahui.” *Liputan* 6. Jakarta, 2022. <https://hot.liputan6.com/read/4859329/pengertian-informasi-ciri-ciri-fungsi-dan-jenis-jenisnya-yang-perlu-diketahui>.
- Sitoyo, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Edited by Ayup. Pertama. Sleman: Lirasi Media Publishing, 2015.
- Solihah, Ratnia. “Perihal Pemerintah Dan Yang Diperintah.” In *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, 63. Pertama., n.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Edited by MT Dr. Ir. Sutopo, S.Pd. Kedua. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Susanto, Vendi Yhulia. “Sepanjang 2019, Devisa Sektor Pariwisata Mencapai Rp 280 Triliun.” *Kontan.Co.Id*. Jakarta, 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2019-devisa-sektor-pariwisata-mencapai-rp-280-triliun?page=1>.
- Syahmeiza, Berry. “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.” *Jurnal Administrasi Negara* 11, no. 1 (2011): 11.
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. Kedua. Depok: Fajar Interpratama Mandiri, 2012.
- W, Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Widyatmaja, I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Edited by I Gusti Ngurah Widyatmaja I Ketut Suwena. Revisi. Denpasar: Pustaka Larasan, 2017.
- . *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Revisi. Denpasar: Pustaka Larasan, 2017.
- Yudianti, Novi. “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu Di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.” *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 1, no. 1 (2021): 12.
- “Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033” (n.d.).
- “Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029” (n.d.).
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025” (n.d.).
- “Undang-Undang Nomor 10 Tentang Kepariwisata” (n.d.).
- “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (n.d.).
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (n.d.).